



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

UNIT KERJA : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALAMAT SIMANULLANG**
2. Jabatan : **WIDYAIKWARA AHLI UTAMA**
3. NHK : **66915**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.002.618.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 556.230.000
2. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 293.280.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 11.232.000
4. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 11.232.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 23.580.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
7. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
8. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
9. Tanah Seluas 876 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 12.264.000
10. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
11. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HIBAH



TANPA AKTA Rp. 37.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 150.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 8.350.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 13.029.958.647

F. HARTA LAINNYA

Rp. 5.600.000

Sub Total

Rp. 14.196.526.647

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.196.526.647

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.